

PERAN *PUBLIC SPACE* SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENJAGA LINGKUNGAN BINAAN KOTA

Rully

Email: ully_placido@yahoo.co.id

Diterima Tanggal: 30 Juli 2016 Disetujui Tanggal: 18 Agustus 2016

Abstrak

Sebagai bagian dari rencana tata ruang kedudukan public space akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan. Rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka.

Latar belakang pemikiran yang digunakan sebagai landasan Penelitian Peran public space sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan binaan kota didasarkan pada pertimbangan dapat terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya, dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan public space yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan di sekitarnya. public space juga menjadi bagian dari Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2016-2020, sebagai kegiatan yang memerlukan penanganan secara spesifik.

Dari hasil penelitian diharapkan dapat tersusun rencana penyediaan dan pengelolaan public space sehingga dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan pada masing-masing kawasan dapat terjaga dengan baik. Melalui kegiatan penelitian ini pula Peran Public Space Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Binaan Kota diharapkan akan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran public space pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai public space alami: berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, maupun public space non-alami atau binaan, sebagai hasil olah karya manusia. Sehingga pada tahap berikutnya dapat dilakukan identifikasi terhadap ketersediaan public space non-alami pada setiap kawasan yang ada di setiap kota.

Kata Kunci : public space, keseimbangan, partisipasi, masyarakat

1. Latar Belakang

Landasan pemikiran mengenai Peran *public space* sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan binaan kota yaitu pada terwujudnya keseimbangan, keserasian, dan keselamatan bangunan gedung

dengan lingkungan di sekitarnya, dengan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan *public space* yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di sekitarnya. *public space* juga menjadi bagian dari

Rencana Strategis Departemen Pekerjaan Umum 2016-2020, sebagai kegiatan yang memerlukan penanganan secara spesifik.

Sebagai bagian dari rencana tata ruang, maka kedudukan *public space* akan menjadi penentu keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan. Rencana tata ruang menjadi landasan dalam mengantisipasi pesatnya perkembangan ruang-ruang terbangun, yang harus diikuti dengan kebijakan penyediaan ruang terbuka.

Perkembangan beberapa kawasan yang karena kondisi dan potensi yang dimiliki perlu direncanakan arah dan bentuk penataan *public space*nya. Dengan demikian perkembangan tata ruang hijau di masing kawasan yang ada pada suatu kota perlu didukung oleh arahan, kebijakan, dan keinginan yang kuat untuk dapat diwujudkan. Ketika identifikasi terhadap keberadaan tata hijau dengan potensi spesifik pada masing-masing kawasan kabupaten/kota dilakukan, maka harus pula diperhatikan peran fungsi yang diembannya, baik dari kedudukannya sebagai bagian dari ruang terbuka, maupun kedudukannya dalam rencana tata ruang, namun mempunyai potensi dalam memberi arah bagi keseimbangan kawasan baik kedudukannya sebagai fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan arsitektural, maupun fungsi ekonominya.

Diharapkan dengan disusunnya rencana, penyediaan, dan pengelolaan *public space*, dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan, sehingga keseimbangan lingkungan hidup dan lingkungan binaan pada masing-masing kawasan dapat terjaga dengan baik. Melalui

kegiatan Penelitian Peran *public space* Sebagai Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Lingkungan Binaan Kota, diharapkan akan dapat diperoleh arah, bentuk, fungsi, dan peran *public space* pada masing-masing kawasan, secara menyeluruh, baik dalam kedudukannya sebagai *public space* alami: berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman nasional, maupun *public space* non-alami atau binaan, sebagai hasil olah karya manusia. Sehingga pada tahap berikutnya dapat dilakukan identifikasi terhadap ketersediaan *public space* non-alami pada setiap kawasan yang ada di setiap Kota.

2. Landasan Teori

A. Ruang Publik

Ruang publik diartikan sebagai ruang dimana anggota masyarakat sebagai warga negara mempunyai akses sepenuhnya terhadap semua kegiatan publik, mereka berhak melakukan secara merdeka didalamnya termasuk mengembangkan wacana publik seperti menyampaikan pendapat secara lisan dan tertulis (A.S. Hikam dalam A.S. Culla, 1999:123)

Dengan tersedianya ruang publik yang bebas maka masyarakat madani (*civil society*) akan terbentuk dengan sendirinya. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang memiliki kebebasan individu didalam institusi/assosiasi (dapat dimasuki dan ditinggalkan secara bebas), kelembagaan tidak mendominasi individu (menghargai otonomi individual), ada partisipasi dan ada pelembagaan hak-hak kewarganegaraan, kebebasan

berbicara, kebebasan pers, kebebasan berorganisasi.

Masyarakat madani adalah merupakan wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan becirikan antara lain, kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), dan keswadayaan (*self supporting*), kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. Adapun ciri-ciri mendasar dari masyarakat Madani, antara lain :

- a. Egalitarianisme
- b. Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi
- c. Keterbukaan partisipasi seluruh anggota masyarakat aktif
- d. Penegakkan hukum dan keadilan
- e. Toleransi dan pluralisme
- f. Musyawarah

(Nurcholis Madjid dalam A.S. Hikam, 1997:122-123).

B. Pertumbuhan Kota

Teori yang menyatakan bahwa pertumbuhan kota berlangsung secara alamiah antara lain dikemukakan oleh Ernest W. Burgess (1925) dalam *The City*, yang menyumbangkan teori pertumbuhan kota yang alamiah tetapi bersifat konserntrik (seperti pusat daerah bisnis, daerah transisi, tempat tinggal pekerja, tempat tinggal kelas menengah, dan tempat tinggal para komuter). Teori pertumbuhan kota yang alamiah tetapi bersifat sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt (1939) dalam *The Structure and Growth of Residential Neighbourhoods in merican Cities*. Dan pola pertumbuhan kota yang alamiah tetapi bersifat inti-berganda

(*multiple-nuclei*) dikemukakan oleh Harris dan Ulman (1945) dalam *Multiple-Nuclei Theory* (teori pusat kegiatan banyak). Ketiga teori di atas menilai pertumbuhan kota berlangsung secara alamiah yang mengikuti pola tertentu (H.S. Yunus, 2000:3-61).

C. Perencanaan Kota

Perencanaan kota (*urban planning*) merupakan merencanakan aktivitas merencanakan sesuatu lingkungan tertentu, yang lebih luas dari pada perencanaan lahan atau fisik, karena mempertimbangkan semua faktor fisik tata guna lahan, ekonomi, politik, administratif dan sosial yang mempengaruhi wilayah kota. John R. Mennery (1986) mendefenisikan perencanaan kota sebagai intervensi di dalam proses alokasi sumber daya, khususnya terhadap tanah dan kegiatan-kegiatan di atasnya, dalam sistem aktivitas kota dan regional oleh otoritas publik yang sah untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sarana yang sesuai (Minnery dalam A. Nurmandi, 1999:141-142).

D. Public Space sebagai Komponen Masyarakat

Di dalam memberikan batasan tentang pengertian Ruang Terbuka, maka ada baiknya terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian ruang. Filosof kenamaan Immanuel Kant dan Plato memberikan rumusan yang baik mengenai hal ini.

Menurut Kant, ruang bukanlah sesuatu yang objektif sebagai hasil pikiran dan perasaan manusia, sedangkan menurut Plato ruang adalah suatu kerangka atau wadah dimana objek dan kejadian tertentu berada (E. Budiharjo dan Dj.Sujarto : 1999)

Pengertian lain tentang ruang seperti tertera di dalam UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautandan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya (Jeluddin Daud, dkk :1996).

Peranan dan fungsi ruang terbuka secara umum adalah :

- Tempat bermain dan berolah raga;
- Tempat bersantai;
- Tempat komunikasi sosial;
- Tempat peralihan, tempat menunggu;
- Tempat mendapatkan udara segar;
- Sebagai sarana penghubung antara suatu tempat dengan tempat yang lain;
- Sebagai pembatas atau jarak diantara massa bangunan.

Fungsi Ekologis :

- Penyegaran udara;
- Menyerap air hujan;
- Pengendalian banjir;
- Memelihara ekosistem tertentu;
- Pelembut arsitektur bangunan

3. Pembahasan

Pada dasarnya target dari tugas pekerjaan ini adalah mempersiapkan rancangan teknis beberapa *public space* di wilayah perkotaan. Pendekatan yang ditempuh adalah berdasar pada arahan dan kebutuhan menurut satuan wilayah yang dikaji sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan binaan kota. Dengan pendekatan tersebut, perencanaan *public space* di wilayah perkotaan diawali dengan

tindak inventarisasi (ulang) atas *public space* yang terdapat di wilayah tersebut. Inventarisasi dilakukan untuk mencacah sekaligus mengambil data dari *public space* yang dimaksud. Pencacahan *public space* untuk diinventarisasi dipandu beberapa hal. Pertama adalah berdasar batasan teoretik, kemudian diputuskan area yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari *public space*. Namun pada kenyataannya penerapan kaidah teoretik ini kurang efektif, karena orientasi pekerjaan ini lebih ke implementasi praktis, dimana *public space* yang sesuai kaidah teoretik seringkali tidak realistik untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Kedua, adalah dengan mengacu pada arahan rencana tata ruang kota yang berlaku ataupun bentuk rencana lain yang berkenaan dengan *public space*, pertamanan, dan sejenisnya. Cara ini juga tidak sepenuhnya aplikatif. Dalam banyak kasus *public space* yang ditetapkan dalam rencana tata ruang seringkali pada saat ini masih sangat tidak jelas keberadaannya (alamat/koordinat) khususnya pada area pengembangan perkotaan baru, karena area yang direncanakan saat ini masih berupa lahan pertanian luas. Ketiga, berdasarkan pada petunjuk instansi yang berwenang. Ini merupakan cara yang paling mudah diikuti, dan berorientasi secara jelas pada keterlaksanaan pembangunan.

A. Penggunaan Ruang Terbuka Umum

Di kawasan perkotaan terdapat berbagai fasilitas umum, sebagian diantaranya

merupakan ruang terbuka umum yang bebas diakses oleh publik, pada ruang terbuka umum tersebut terdapat kebebasan berekspresi, membentuk organisasi yang independen dan hak memperoleh informasi yang transparan. Namun begitu cukup banyak juga responden yang menyatakan bahwa mereka merasa ragu dalam ruang terbuka umum tersebut terdapat kebebasan berekspresi, membentuk organisasi yang independen dan hal memperoleh informasi yang transparan. Bahkan ada juga responden yang menyatakan tidak ada kebebasan berekspresi, membentuk organisasi yang independen serta mendapatkan informasi yang transparan dalam ruang terbuka tersebut.

Pada ruang terbuka umum dimungkinkan terjadi keberagaman, keadilan dan toleransi bagi perbedaan warga kota. Keberadaan ruang terbuka umum di Indonesia pada umumnya belum sepenuhnya dapat diakomodir oleh pemerintah. Memang sebagian dari ruang terbuka umum ini sudah disediakan oleh pemerintah namun jumlahnya masih sedikit dan masih minim perawatannya.

Kurangnya akomodir pemerintah terhadap ruang terbuka umum ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mempunyai komitmen untuk memberikan kesempatan dan apresiasi bagi keberagaman masyarakat

baik ditinjau dari segi kultur, dan kebutuhannya.

B. Partisipasi Masyarakat

Frekuensi keterlibatan masyarakat dalam upaya untuk melakukan pengawasan dan menjaga lingkungan khususnya *public space* masih sangat rendah terutama untuk sektor swasta. Paling Tinggi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan ada pada sektor sosial. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tersebut juga sejalan dengan rendahnya frekuensi dalam memberikan masukan yang konstruktif terhadap pelayanan yang diberikan oleh pihak-pihak terkait.

Dalam proses pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan *public space* di Indonesia, masyarakat masih bersifat apatis. Berdasarkan indentifikasi awal sebagian besar responden, tidak ada keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan publik space yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah maupun swasta, bukan dikarenakan tidak adanya sarana/media bagi keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan tersebut. Sebetulnya sebagian kota-kota di Indonesia sudah memfasilitasi keterlibatan langsung masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan *public space*.

Pembentukan Masyarakat Madani (Civil Society) sangatlah diperlukan untuk mengantisipasi kurangnya

partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya *public space*, Ciri utama dari masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kemandirian secara politik, sosial dan ekonomi atau merupakan masyarakat yang memiliki kebebasan terhadap pengaruh negara dan pengaruh mekanisme pasar. Sifat kemandirian yang dimiliki oleh masyarakat madani merupakan pencerminan dari ciri civilisasi (peradaban/kesopanan), penegakan disiplin sosial, moralitas masyarakat, identitas, kohesivitas sosial, otonom dan kemandirian politik, partisipasi sosial, tertib sosial, keadilan sosial serta visi dan misi strategis.

Bila ditinjau dari ciri masyarakat madani yang ideal sebagian masyarakat perkotaan di Indonesia masih jauh dari kondisi tersebut. Kondisi yang terjadi pada kenyataannya dapat dilihat dari jenis hubungan sosial yang terjalin. Hubungan sosial yang terjalin cenderung hubungan sosial yang negatif, seperti intimidasi, penindasan, kekerasan, teror serta ketakutan. Sangat jarang terjadi hubungan positif antara anggota masyarakat yang tercermin dalam sikap saling menghargai, tolong-menolong dan pengertian kebersamaan.

Anggota masyarakat sekarang ini masih kurang patuh terhadap norma dan peraturan yang telah ditetapkan berkaitan dengan partisipasinya dalam menjaga lingkungan khususnya *public space*.

Sifat individualisme pada masyarakat perkotaan yang masih sangat menonjol juga akan mempengaruhi kurangnya upaya untuk turut berperan serta dalam menjaga lingkungan.

Peran pemerintah masih sangat menonjol dalam hal ini, dimana Pemerintah masih sangat dominan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat tanpa ikut melibatkan masyarakat itu sendiri.

4. Kesimpulan

Dari gambaran awal masalah Peran *public space* sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan binaan kota yang dapat dijumpai di wilayah perkotaan dapat mengungkapkan adanya sejumlah permasalahan umum yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan *public space* lebih lanjut. Permasalahan yang teridentifikasi ini merupakan hasil evaluasi dan analisis terhadap *collective mapping*/pemetaan keseluruhan *public space* dalam wilayah maupun kajian individual. Permasalahan yang teridentifikasi dapat disebutkan di antaranya adalah:

- 1) Dalam proses diskusi dan sosialisasi yang telah dilaksanakan untuk semua wilayah kota/kabupaten ternyata *public space* yang menjadi subjek bahasan dalam kegiatan penelitian ini dapat memiliki rentang yang sangat luas.
- 2) *Public space* di wilayah perkotaan memiliki urgensi yang lebih tinggi untuk ditangani. Misalnya saja terungkap dalam peraturan perundang-undangan KepMendagri 1/2007 yang

- sebatas mengatur *public space* di kawasan perkotaan.
- 3) Pengadaan *public space* dalam derajat tertentu sering terhenti sebatas wacana, bahkan dipandang sebagai residu dari pembangunan fisik. Oleh karena itu pengembangan *public space* perlu dilakukan dengan optimal dan efisien, dan lebih disukai bila tetap membuka peluang berlangsungnya partisipasi dan aktivitas ekonomi di atasnya tanpa mengurangi fungsi *public space* itu sendiri.
 - 4) Perlu adanya sosialisasi peran *public space* dalam pembangunan ekonomi wilayah, dimana meski tidak memberikan keuntungan finansial, *public space* dapat mengembalikan penyegaran bagi warga kota setelah menjalani kegiatan rutin sehari-hari atau mingguan, sehingga tingkat produktivitasnya dapat terjaga.
 - 5) Keberadaan *public space* pada umumnya belum direncanakan secara sengaja. Dalam banyak kasus, pengadaan *public space* dimungkinkan karena memanfaatkan keberadaan ruang terbuka yang tersedia, yang bisa saja berasal dari persil kosong, atau tanah kebun, atau sempadan sungai, dan sejenisnya. Dapat dimaklumi mengingat banyak rencana pembangunan tata ruang di Indonesia lebih berorientasi pada aspek pengaturan (*regulatory*) daripada sebagai cetak biru pembangunan yang membentuk kota (*developmental*), sehingga banyak zona kota yang kekurangan pasokan *public space*, dan sebaliknya ada juga yang berlebih. Kalau berlebih pun bentuknya tidak menjawab kebutuhan setempat.
 - 6) Kultur pemahaman dan pemaknaan arti dan fungsi *public space* suatu kota bisa berubah karena perubahan tata nilai dan pemaknaan tempat yang bersangkutan sehingga kekuatan pemahaman tentang obyek pada tingkatan desainer/arsitek sekaligus upaya kreatif yang dilakukannya untuk menghasilkan pewardahan ruang publik kota yang sesuai kultur dan struktur sosial masyarakatnya.
 - 7) Keterlibatan pemerintah setempat dalam usaha untuk membentuk masyarakat yang madani (*Civil Society*) perlu ditingkatkan.
 - 8) Dari identifikasi global mengenai peran *public space* pada suatu kota didapatkan fenomena perbedaan pemaknaan melalui wujud desain arsitektural oleh masyarakatnya.
 - 9) Wujud desain arsitektural *public space* pada suatu kota akan mempengaruhi tingkatan upaya masyarakatnya dalam menjaga lingkungan binaan kota.

5. Daftar Pustaka

Anonimous, 1989. *Laporan Dinas Pertamanan DKI 1988 – 1989*. Dinas Pertamanan DKI Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Depdagri, Ruang Terbuka Hijau Kota. Jakarta, 1990

Budiharjo, Eko dan Djoko Sujarto, 1999, **Kota Berkelanjutan**, Alumni, Bandung.

- Budiharjo, Eko, 1984, **Arsitektur dan Kota di Indonesia**, Alumni, Bandung.
- Budiharjo, Eko, 1999, **Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota**, Andi, Yogyakarta.
- Danisworo. (1995). “**Sumber Daya Budaya dan Konservasi Kota dalam Konteks Perancangan Kota**”, *Lokakarya Pariwisata Perkotaan : Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Binaan di Kota sebagai Basis Pariwisata Perkotaan*. Pusat Studi Penelitian Pariwisata, Bandung.
- Daud, Jeluddin, dkk (Ed.), 1996 **Penataran Ruang Menghadapi PJP-II**, USU Pres, Medan.
- Fatah, Eep Saefullah, 1994, **Unjuk Rasa, Gerakan Massa dan Demokratisasi**, Prisma No. 4, LP3ES, Jakarta.
- Fatnership for Governance Reform*, 2002, **Tata Pemerintahan Yang Baik Dari Kita Untuk Kita**, Jakarta.
- Hadi, Hariri, 1987, **Strategi Pembangunan Kota-kota Dalam Mewujudkan Kesatuan Ekonomi Nasional**, Prisma No.1, LP3ES, Jakarta.
- Handinoto, (1995). **Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya : 1870 – 1940**. Andi Press, Yogyakarta.
- Hikam, Muhammad As., 1991, **Negara, Masyarakat Sipil dan Gerakan Keagamaan Dalam politik Indonesia**, Prisma No.3, LP3ES, Jakarta.
- Hikam, Muhammad As, 1997 **Demokrasi dan Civil Society**, LP3ES, Jakarta
- Majid, Nurcholis, 2002, **Mari Selamatkan Bangsa dan Negara dan Mari Hentikan Nafsu Untuk Berkuasa Semata**, Makalah Pada Diskusi Panel Tata Pemerintahan Yang Baik, Kerjasama Fisip USU dan *Partnership for Governance Reform in Indonesia*, Medan.
- Nugroho, Iwan, 1997, **Modal Sosial dan Perkembangan Kota**, Prisma No.6, LP3ES, Jakarta.
- Nurmandi, Ahmad, 1999, **Manajemen Perkotaan, Aktor Organisasi dan Pengelolaan Daerah Perkotaan di Indonesia**, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta.
- Pelly, Usman, 2000, **Perkembangan Kota dan Manusianya : Medan Menuju Kota Metropolitan Yang Modern**, Makalah pada Seminar Hari Jadi Kota Medan ke-410, Medan.
- Biodata Penulis,**
Rully, S-1 Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tunas Pembangunan (1996), S-2 Magister Teknik Arsitektur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2003), Dosen Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Tunas Pembangunan Surakarta sejak 1998.